

INTISARI

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara peringkat perusahaan, skema kontrak, dan waktu konsesi tersisa terhadap produktivitas blok migas di Indonesia, dengan latar belakang tren penurunan produksi migas yang berbanding terbalik dengan peningkatan konsumsi domestik. Studi ini menggunakan pendekatan *mixed method*, menggabungkan analisis kuantitatif regresi linear berganda dengan metode kualitatif Delphi dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta mengembangkan model pemeringkatan perusahaan migas menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA). Pendekatan teoretis yang digunakan adalah *New Institutional Economics* (NIE), yang menekankan pentingnya struktur kelembagaan, aturan main, dan insentif dalam mempengaruhi perilaku ekonomi dan produktivitas. Sampel terdiri dari 182 tahun-wilayah kerja antara 2015-2019 yang mencakup berbagai perusahaan migas di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peringkat perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap total produksi migas, khususnya di wilayah kerja (WK) besar, sementara waktu konsesi tersisa hanya berpengaruh signifikan pada produksi gas dan memiliki dampak berbeda tergantung ukuran WK. Skema kontrak *gross split* ditemukan berpengaruh negatif terhadap produksi migas, menandakan perlunya evaluasi ulang kebijakan kontrak dalam konteks insentif dan aturan kelembagaan yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan perspektif NIE yang menyoroti bagaimana kelembagaan dan kontrak memengaruhi efisiensi dan hasil produksi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan domestik mampu menghasilkan produksi migas yang lebih besar di WK besar dibandingkan perusahaan asing, menantang asumsi sebelumnya. Temuan kualitatif menegaskan perlunya peremajaan kebijakan konsesi yang lebih adil, transparan, dan fleksibel untuk meningkatkan daya tarik investasi dan keberlanjutan industri migas.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas penerapan teori NIE dalam konteks industri migas di Indonesia, terutama dalam memahami bagaimana struktur kelembagaan, kontrak, dan insentif memengaruhi produktivitas. Implikasi praktis dari penelitian ini mendorong regulator dan pemerintah untuk merancang kebijakan migas yang responsif terhadap karakteristik wilayah kerja dan kapasitas perusahaan, dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dan negara. Rekomendasi kebijakan mencakup prioritas pengelolaan WK besar oleh perusahaan dengan peringkat tinggi dan pemberian peluang lebih merata bagi perusahaan kecil dalam mengelola WK kecil, serta revisi skema kontrak agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip kelembagaan yang efektif. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan terkait variabel kelembagaan lain yang dapat mempengaruhi produktivitas migas dan pengembangan *threshold* ukuran perusahaan untuk pengelolaan WK kecil.

Kata kunci: Kebijakan minyak dan gas; New institutional economic; Peringkat blok; waktu konsesi;; Ukuran blok; Indonesia

ABSTRACT

This study examines the relationship between company rankings, contract schemes, and remaining concession duration on the productivity of oil and gas blocks in Indonesia, against the backdrop of declining oil and gas production amid rising domestic consumption. Using a mixed-method approach, the research combines quantitative multiple linear regression analysis with qualitative Delphi and Focus Group Discussion (FGD) methods, and develops a company ranking model through Principal Component Analysis (PCA). The theoretical framework is based on New Institutional Economics (NIE), which emphasizes the role of institutional structures, rules, and incentives in shaping economic behavior and productivity. The sample consists of 182 block-year observations between 2015 and 2019, covering various oil and gas companies operating in Indonesia.

The findings indicate that company ranking significantly and positively influences total oil and gas production, particularly in large working areas (WAs), while the remaining concession duration significantly affects only gas production and has varying impacts depending on the WA size. The gross split contract scheme is found to have a negative effect on oil and gas production, suggesting a need for policy reassessment regarding contract incentives and institutional arrangements. These results align with NIE perspectives, highlighting how institutions and contracts affect efficiency and production outcomes. Furthermore, domestic companies were found to produce more oil and gas in large WAs compared to foreign companies, challenging prior assumptions. Qualitative findings reinforce the necessity of renewing concession policies to be more equitable, transparent, and flexible to enhance investment attractiveness and industry sustainability.

This study contributes theoretically by expanding the application of NIE within Indonesia's oil and gas sector, particularly in understanding how institutional structures, contracts, and incentives impact productivity. Practically, the findings recommend regulators and policymakers to design oil and gas policies that respond to working area characteristics and company capacities, while considering institutional factors that balance investor and state interests. Policy recommendations include prioritizing the management of large WAs by high-ranked companies and providing more opportunities for smaller companies to manage smaller WAs, alongside revising contract schemes to better align with effective institutional principles. The study also opens avenues for future research on other institutional variables affecting oil and gas productivity and the development of company size thresholds for managing small WAs.

Keywords: Oil and gas policy; Block rating; New institutional economic; Concession time; Gross split; Block size; Indonesia.